

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokrasi dalam menciptakan sebuah sistem akuntansi di daerah. Kesemuanya itu harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan keuangan guna melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik dan budaya diperlukan suatu informasi akuntansi yang akurat yaitu berupa laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka menciptakan otonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang handal dan relevan agar dalam pelaporannya nanti dapat menghasilkan suatu informasi yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk meningkatkan kinerja instansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman-Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*.

Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap Kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*. Pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami perubahan yang besar. Bentuk Laporan pertanggungjawaban sebelumnya hanya berupa laporan perhitungan APBD, saat ini laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Faktor perilaku yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor organisasional (pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan) serta adanya dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan yang juga berpengaruh dalam implementasi sistem yang berkaitan dengan masalah individu personal.

Penelitian ini akan menguji pengaruh berperilaku organisasi terhadap Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, dimana sistem

tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisasional, dalam meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor keperilakuan organisasi yang meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, dalam implementasi sistem yang berkaitan dengan masalah individu agar tidak terjadi penolakan sistem yang dikembangkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka peneliti memilih cara proporsional. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini menjadi:

1. Apakah keperilakuan organisasi (dukungan atasan) berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
2. Apakah keperilakuan organisasi (kejelasan tujuan) berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Apakah keperilakuan organisasi (pelatihan) berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh berperilaku organisasi (dukungan atasan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh berperilaku organisasi (kejelasan tujuan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh berperilaku organisasi (pelatihan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang transparansi dan akuntabilitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan pertimbangan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Indonesia terutama yang berhubungan dengan perilaku dari pengguna.

E. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: Faktor berperilaku akuntansi, variable Dependen, Independen pengertian sistem akuntansi keuangan daerah, kebijakan akuntansi, akuntabilitas dan transparansi, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Kriteria Sampel, Metode Pengambilan Sampel, Metode Pengumpulan data, Variabel Penelitian, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor keprilakuan organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.